

TESIS

**PIDANA PENGAWASAN DALAM KEBIJAKAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



Oleh
NORWafa RAHMAWATI
NIM. 2120215320074

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**PIDANA PENGAWASAN DALAM KEBIJAKAN PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
NORWafa RAHMAWATI
NIM. 2120215320074**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**Judul Tesis : PIDANA PENGAWASAN DALAM KEBIJAKAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Nama : Norwafa Rahmawati
NIM : 2120215320074

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP.19810626 200604 1 006

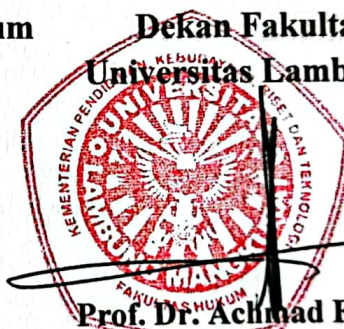
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING UTAMA



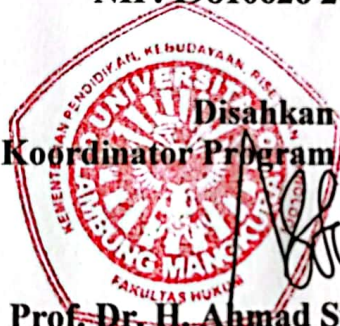
**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 02 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
3. Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norwafa Rahmawati

NIM : 2120215320074

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Norwafa Rahmawati

NIM.2120215320074

RAHMAWATI, NORWAFI. 2024. "Pidana Pengawasan Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat; Pembimbing Utama **Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H.** 105 halaman.

RINGKASAN

Kebijakan pidana pengawasan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dengan pengaturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini. Penjatuhan putusan mengenai pidana bersyarat masih sedikit karena hanya sebagai cara pelaksanaan pidana yang bukan termasuk pidana pokok. Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim adalah suatu penjatuhan pidana secara pasti yang pelaksanaannya saja ditunda dengan syarat, sifatnya subjektif karena bergantung pertimbangan dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat. Kebijakan pidana pengawasan dalam KUHP 2023 memiliki batasan acaman pidana penjara maksimal lima tahun yang berarti ada sifat obyektif bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan pidana pengawasan ialah tindak pidana yang tidak berat. Belum terjadi penjatuhan pidana secara pasti. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan integratif yaitu sistem kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku dan juga sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pidana pengawasan dapat diberlakukan pada masa yang akan datang setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan. Hakim memiliki dasar untuk menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pidana pengawasan tetap berpegang terhadap ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan dengan keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 51-54 dan Pasal 70 Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

KUHP Nasional yang akhirnya telah disahkan oleh pemerintah setelah sekian lama berproses dan dimatangkan dari segala segi memang mengatur banyak hal baru, diantaranya adalah pidana pokok yang dahulu terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, kini berubah menjadi penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ketentuan yang baru berlaku pada tahun 2026 tersebut menekankan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mengembalikan terpidana kepada masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun

paradigma ppidanaan berbasis keadilan restorative melalui perubahan subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana. Dalam menciptakan sistem hukum yang kerkeadilan mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan. Agar pelaksanaan pidana pengawasan berjalan dengan efektif, peradilan pidana harus terintegrasi dengan baik. Sinkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum.

RAHMAWATI, NORWafa. 2024. “Pidana Pengawasan Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat; Pembimbing Utama **Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H. dan** Pembimbing Pendamping **Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H.** 105 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Pidana Pengawasan, Pemidanaan, Pembaharuan Hukum

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam KUHP yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Menjadi penting bagi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian hukum terhadap syarat-syarat mengenai pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 76 sebagai wujud perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana.

RAHMAWATI, NORWAFI. 2024. "Criminal Supervision in the Policy of Criminal Law Reform in Indonesia", Law Masters Program, Post-Graduate Program, Lambung Mangkurat University; Main Advisor Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H. and Counselor Advisor Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H. 105 pages.

ABSTRACT

Keywords : Criminal Supervision, Criminalization, Law Reform

This thesis aims to analyze Criminal Supervision in Criminal Law Reform Policy in Indonesia. This thesis uses a research method of research on norms through library research which is sourced from 2 (two) legal materials, namely primary and secondary legal materials. Library legal research is a method or method used in legal research conducted by examining existing library materials.

The result of this study found that the improvement of Criminal Code is conducted by the enactment of Law Number 1 Of 2023 on Criminal Code which regulates supervision punishment as a new form of punishment in the main punishment as Article 65 as a form of improvement of conditional punishment regulated in Article 14a to Article 14f in the current Criminal Code, namely Law Number 1 Of 1946. It is important for Law Number 1 Of 2023 to provide legal certainty on the conditions of supervision punishment as stipulated in Article 76 as a form of protection for both perpetrators and victims of criminal offense.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PIDANA PENGAWASAN DALAM KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
4. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan selama proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
6. Seluruh dosen pengajar program studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
7. Seluruh Staf Akademik Magister Hukum Program Pasca Sarjana yang telah membantu selama studi sampai penulisan tesis ini selesai;

8. Orang Tua terkasih tersayang dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini;
9. Syarif Hidayat, S.M., S.H., M.Kn., selaku kekasih penulis yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini;
10. Semua teman-teman PMH Universitas Lambung Mangkurat yang senantiasa saling membantu selama perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar lebih menambah pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan tesis ini. Namun, masih terbersit harapan agar tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi semua yang memerlukan. Akhir kata, penulis hanya dapat mengucapkan doa semoga Allah Swt menerima dan membalas segala kebaikan kita semua.

Banjarmasin, 01 Juli 2024

Norwafa Rahmawati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	33
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	38
BAB II KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	40
A.Pidana Bersyarat dalam KUHP yang berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40
B.Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	62
BAB III KEBIJAKAN MODEL PIDANA PENGAWASAN DALAM HUKUM PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG.....	71
A. Pidana Pengawasan di Negara Lain	71
B. Kebijakan Model Pidana Pengawasan di Masa Yang Akan Datang.....	78

BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	